

Sepuluh prinsip untuk transparansi global

Transparansi di industri perikanan adalah senjata terbaik yang kita miliki untuk melawan tragedi kembar di sektor ini yaitu penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia. EJF telah menyusun sepuluh prinsip sederhana untuk diterapkan oleh negara.

- 

1 Memberikan nomor unik untuk seluruh kapal

Seperti plat mobil, tapi nomor unik ini akan terus digunakan kapal selamanya dari pembuatan sampai menjadi rongsokan, terlepas dari perubahan nama dan bendera dan seharusnya disimpan dalam sistem pencatatan kapal global.
- 

2 Membuka akses data penelusuran kapal untuk publik

Hal ini dimaksudkan, negara tetangga, organisasi non-pemerintah dan lainnya, dapat membantu untuk mengawasi.
- 

3 Mempublikasi daftar lisensi penangkap ikan dan otorisasinya

Siapa yang diijinkan untuk menangkap ikan di suatu wilayah? Dikombinasikan dengan data penelusuran kapal, membuat setiap orang dapat memonitor dan memberi peringatan jika terjadi penangkapan ikan ilegal.
- 

4 Mempublikasikan hukuman yang diberikan untuk kejahatan perikanan

Penangkapan dan sanksi yang dijatuhkan untuk penangkapan ikan ilegal atau pelanggaran hak asasi manusia di kapal perikanan harus diumumkan, sehingga pelanggar dapat diidentifikasi.
- 

5 Melarang memindahkan ikan antar kapal di tengah laut – kecuali jika di monitor dengan ketat

Praktek ini memungkinkan perusahaan yang tidak bermoral untuk membuat pekerja tetap berada di laut, tidak dibayar selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, membuat asal ikan, setelah di darat, sangat sulit dilacak.
- 

6 Membuat data digital untuk informasi kapal

Menyimpan informasi tentang registrasi, lisensi, tangkapan dan kru kapal penangkap ikan sangatlah penting, pada akhirnya dapat digunakan untuk sertifikasi tangkapan yang dipancing secara legal dan etis.
- 

7 Berhenti menggunakan bendera kemudahan (Flags of Convenience) untuk kapal penangkap ikan

Beberapa negara membiarkan setiap kapal mengibarkan bendera negara mereka untuk mendapatkan uang, tetapi tidak memonitor dengan benar. Hal ini membuat pemilik kapal penangkap ikan ilegal tetap tidak terdeteksi.
- 

8 Mempublikasikan secara detil pemilik kapal sebenarnya – siapa yang membawa pulang semua keuntungan

Perusahaan palsu sering digunakan sebagai kedok sehingga penerima keuntungan sebenarnya dari kegiatan penangkapan ikan ilegal ini aman dari tuntutan.
- 

9 Menghukum semua yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nir-peraturan (IUU fishing)

Negara harus menjamin bahwa tidak ada satupun warganegara yang mendukung, terlibat atau mendapat keuntungan dari penangkapan ikan ilegal, tidak terkecuali dimana mereka berada atau bendera apa yang dikibarkan di kapal tersebut.
- 

10 Mengadopsi standar internasional untuk kapal penangkap ikan dan perdagangan produk perikanan

Hal ini mencakup *the Port State Measure Agreement (PSMA)*, *the Work in Fishing Convention (C188)* dan *the Cape Town Agreement (CTA)*.